

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan menurut para ahli adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah menunjuk pada kemampuan, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010:210-224).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2010: 59-60).

Menurut Katz mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai (Huraerah, 2008:12). Saat ini kita berada pada jaman modern dimana pembangunan (*development*) marak dilakukan diberbagai daerah maupun kota, menjadi tolak ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada taraf yang lebih baik, demi mengetaskan masalah kemiskinan. “Menurut supriatna (1996: 240-241) Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Pendidikan dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan. Produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunvukan lingkaran ketidakberdayaan dalam buku (Jamaludin, 2015:237)”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai pembangunan pemerintah berusaha untuk memberikan program yang dapat diikuti masyarakat luas khususnya perempuan atau ibu rumah tangga yaitu melalu program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS). Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan”

kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, program (P2WKSS) (Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) diselenggarakan untuk memicu terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan “bedah desa”. Adapun instansi-instansi terkait mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Perkebunan, Peternakan, Dinas Sosial, dan beberapa SKPD lainnya. Hal ini berarti pembangunan harus meliputi segala aspek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengupayakan hal tersebut, segala program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki harus menjadi panduan bagi optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Perspektif kesetaraan gender yang berdasarkan pada kesamaan perolehan akses, kontrol, peran, serta kesempatan untuk terlibat dalam program pembangunan hendaknya menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Program ini pada pelaksanaannya selalu menjadi program yang dinanti masyarakat desa karena program ini menjadi pemicu pembangunan desa yang selama ini berhasil menggerakkan segala sendi perdesaan untuk mengupayakan kemajuan desa. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan program ini pun digarap dengan penuh pertimbangan dan kecermatan oleh tim dari Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup di BP3AKB Provinsi Jawa Barat (Kiki, 2017)

Desa Binangun kecamatan pataruman kota banjar juga tak luput untuk mendukung, menjalankan dan ikut serta dalam program tersebut yang disesuaikan dengan kerjasama antara badan pemberdayaan masyarakat dan biro pemberdayaan perempuan atau instansi yang menangani. Pemerintah setempat juga mengacu pada surat keputusan menteri negara pemberdayaan perempuan tentang revitalisasi (P2WKSS). Desa Binangun ini merupakan salah satu wilayah di Kota Banjar yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi binaan (P2WKSS) Kota Banjar melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan kriteria program diantaranya keluarga yang kurang memenuhi standar kesehatan keluarga, masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, dikarenakan masih adanya orang tua disana yang buta huruf.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) semakin kurang kesadaran masyarakat akan makna sebuah lingkungan yang lestari. Dengan semakin modernnya perkembangan zaman seharusnya kesadaran manusia terhadap lingkungan dan pola hidup yang bersih dan sehat itu semakin tinggi, namun ternyata saat ini yang terjadi tidaklah demikian, bahkan malah sebaliknya, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pola hidup yang bersih dan sehat pada masyarakat sekitar desa Binangun.

Pada mulanya para perempuan khususnya ibu-ibu di desa binangun adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurus keluarga. Dengan artian ibu-ibu tersebut sehari-harinya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga biasa yang mengurus kebutuhan domestik suami dan anak. Seiring berjalanya waktu hal tersebut

membuat perangkat desa binangun tergugah untuk mengikutsertakan keluarga khususnya ibu-ibu yang tergolong dalam masyarakat kurang mampu dan tergolong dalam masyarakat yang kurang memenuhi standar kesehatan di desa binangun untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan (P2WKSS) untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Pengembangan potensi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu memberikan kegiatan positif pada perempuan di desa binangun sehingga terciptanya perempuan sekaligus ibu rumah tangga yang produktif.

Dengan adanya program (P2WKSS) ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kaum perempuan merasa diperhatikan dan terutama dihargai kapasitasnya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan.

Warga perempuan yang berusia 15-64 tahun dengan tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah masuk dalam kategori keluarga miskin tidak lagi hanya bertopang dagu dan menjadi pelaksana urusan domestik rumah tangga namun juga ikut berperan dalam roda perekonomian keluarga. Melalui pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh program ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi warga Negara yang berdaya. Dari uraian diatas peneliti tertarik meneliti:

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya orangtua di desa Binangun yang buta huruf
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
2. Adanya keluarga yang kurang memenuhi standar kesehatan
3. Perempuan yang berusia 15 – 64 tahun dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah yang masuk dalam kategori keluarga miskin

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kader (P2WKSS) dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan bagi masyarakat Desa Binangun?
2. Bagaimana peran kader (P2WKSS) dalam bidang kesehatan dan pendapatan bagi masyarakat Desa Binangun?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat berjalannya program pemberdayaan (P2WKSS) di Desa Binangun?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran kader (P2WKSS) dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan bagi masyarakat Desa Binangun
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran kader (P2WKSS) dalam bidang kesehatan dan pendapatan bagi masyarakat Desa Binangun
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat berjalannya program pemberdayaan (P2WKSS)

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini juga, diharapkan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu terutama pihak akademis.
2. Secara praktis penelitian ini akan memberikan penjabaran kepada masyarakat bahwa pemberdayaan program (P2WKSS) akan memberikan dampak serta pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga melalui peran perempuan.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan” kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, maka dalam mewujudkan harus dimulai dari upaya mensejahterakan keluarga. Peran perempuan dalam pembangunan adalah telah jelas mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera dan membina generasi muda.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu

upaya untuk mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia termasuk termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual perempuan melalui kegiatan lintas bidang dalam rangka pembangunan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna (Suharto, 2010:58).

Berikut ini beberapa definisi tentang pemberdayaan pertama, secara konseptual pemberdayaan adalah upaya membangun sumberdaya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang di miliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, secara bahasa pemberdayaan berarti penguatan secara istilah disamakan dengan istilah pengembangan dua istilah ini dalam batas – batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan. (Jamaludin, 2015:244).

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek yang dikenal di bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan sosial dengan nama '*Self-Determination*' (Rukminto, 2008:78).

Dalam teori sosiologi modern dikenal teori strukturasi yang dimana teori tersebut merupakan bidang mendasar studi ilmu sosial. Menurut teori strukturasi bukanlah pengalaman aktor individual atau bentuk-bentuk kesatuan sosial tertentu, melainkan praktik sosial yang diatur melintasi ruang dan waktu. Teori tersebut memusatkan perhatiannya pada praktik sosial yang berulang-ulang, yang menghubungkan antara agen dan struktur (Ritzer dan Goodman, 2003:507).

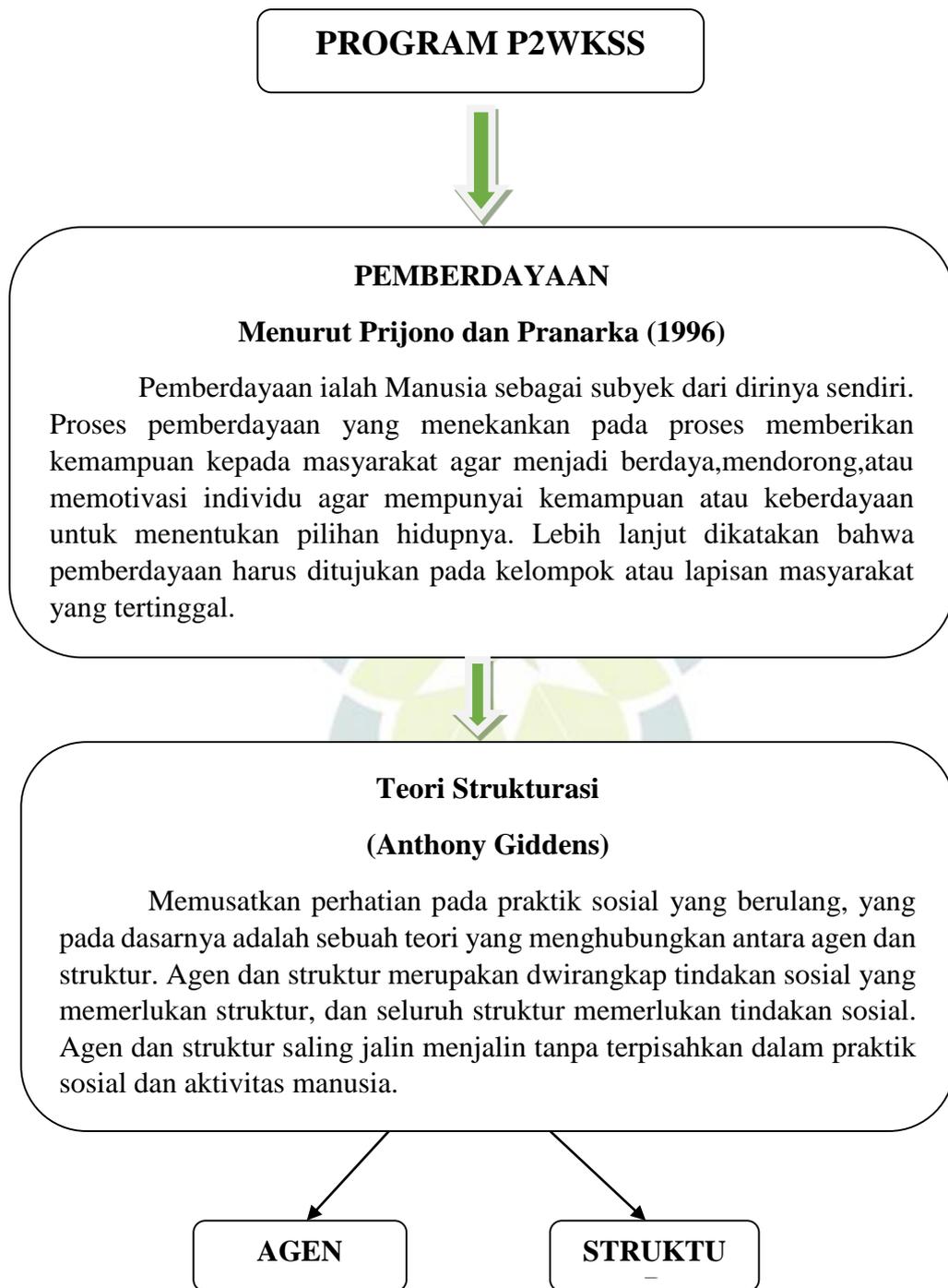
Adapun kata agensi tidak mengacu pada maksud yang dimiliki orang ketika melakukan sesuatu melainkan terutama pada kemampuannya dalam melakukan sesuatu itu, (yang karena itu juga kenapa agensi mengandung kuasa: sedangkan menurut *theoxford english dictionary* yang diartikan sebagai orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan dampak). Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku dalam artian, bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apapun dalam suatu urutan tindakan tertentu (Giddens, 2010:14).

Dalam bidang kesadaran pun giddens membedakan antara kesadaran diskursif dan kesadaran praktis, yang dimana kesadaran diskursif memerlukan kemampuan untuk melukiskan tindakan kita dalam kata-kata. Sedangkan kesadaran praktis melibatkan tindakan yang dianggap aktor benar, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang mereka lakukan. Tipe kesadran

praktis ini lah yang sangat penting bagi teori strukturasi giddens, teori ini lebih memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan aktor ketimpang apa yang dikatakannya (Ritzer dan Goodman, 2003:509).

Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu, melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal. Struktur tidak disamakan dengan kekangan (constraint) namun selalu mengekang (constraining) dan membebaskan (enabling). Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuannya, pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki 'unintended consequences' (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Dalam memahami pemikiran Giddens, minimal bisa berangkat dari dua pokok pembicaraan. Pertama, ialah pelaku (agent) dan struktur (structur), kedua ialah ruang (space) dan waktu (time).

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perempuan berusia 15 - 64 tahun yang tergolong keluarga miskin. Objek dalam penelitian ini yaitu warga binaan (masyarakat), Kader P2WKSS, dan pemerintah Desa. Adapun tujuan diberdayakannya masyarakat itu untuk membuat perubahan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalami kehidupan yang sehat sejahtera sesuai pencapaian tujuan program (P2WKSS). Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di desa Binangun kecamatan Patraruman kota Banjar. Hal ini karena desa ini adalah salah satu desa yang terpilih untuk mengikuti program (P2WKSS) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran